



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BANK INDONESIA (BI)  
**UNIT KERJA** : BANK INDONESIA INSTITUTE

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : CLARITA LIGAYA ISKANDAR
2. Jabatan : KEPALA GRUP
3. NHK : 260797

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **17.985.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.510.000.000
5. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **895.000.000**

1. MOBIL, MG MG 5 GT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOBIL, WULING BINGOU Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. MOBIL, BYD SEAL Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **1.959.200.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **2.984.204.652**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **5.577.158.462**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----**



|                                   |     |                |
|-----------------------------------|-----|----------------|
| Sub Total                         | Rp. | 29.400.563.114 |
| III. HUTANG                       | Rp. | 399.492.000    |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 29.001.071.114 |

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.